



# LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan H. M. Rafi'i No. 3 Madurejo Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

Telp : (0532) 29002 E-mail : [bappedakabkobar@yahoo.com](mailto:bappedakabkobar@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

Laporan ini disusun untuk menjabarkan hasil pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022 Kabupaten Kotawaringin Barat. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan *good governance* sesuai dengan misi kepala daerah.

Laporan kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan pada tahun mendatang.

Pangkalan Bun, Februari 2023  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Kotawaringin Barat



Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., MTP  
NIP. 19680609 199503 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	77,25 (hasil penilaian kinerja 2021)	-	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Bappeda, Desember 2022

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 100% dengan peringkat kinerja sangat tinggi. Sedangkan kinerja anggaran 96,92% dari Pagu Anggaran Rp. 11.088.417.000 Realisasi Rp. 10.747.344.747 di mana terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,08%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Bertambahnya tugas pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan perencanaan bukan hanya diawasi sendiri, tetapi dengan melibatkan banyak pihak;
- b. Tuntutan perencanaan kegiatan yang visioner, berhasil dan berdaya guna tinggi menjadi target keberhasilan yang harus diwujudkan
- c. Harmonisasi dan sinergi dalam melaksanakan perencanaan menjadi hal krusial untuk mendukung pencapaian target pembangunan.
- d. Perencanaan yang terpadu, lintas sektor, multi aktor, bukan hanya di atas kertas melainkan mampu memberikan dampak yang signifikan pada capaian target pembangunan.

Sehingga Bappeda diharapkan dapat melaksanakan strategi *Collaborative Planning* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Data Umum.....	2
1.3 Aspek Strategis.....	8
1.4 Permasalahan Utama .....	11
1.5 Landasan Hukum.....	12
1.6 Sistematika Penyajian.....	12
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b> .....	<b>14</b>
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan .....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	18
2.3 Rencana Kinerja Tahunan .....	19
2.4 Perjanjian Kinerja.....	20
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>27</b>
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan .....	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	28
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional .....	42
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.5 Inovasi/Pengembangan Layanan.....	44
3.6 Realisasi Keuangan .....	47
<b>BAB IV Penutup</b> .....	<b>53</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b> .....	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan
Tabel 1.2	Data Pegawai Per 31 Desember 2022
Tabel 1.3	Analisis Kebutuhan Pegawai 2022
Tabel 1.4	Data Aset Tahun 2022
Tabel 1.5	Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Tantangan Organisasi
Tabel 1.6	Linearitas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2017-2022
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2019
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Tahun 2020-2022
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2022
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Tabel 2.7	Anggaran Program dan Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Capaian Kinerja Tahun 2022
Tabel 2.8	Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Daerah
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Utama 2022
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Utama Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Utama sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Tabel 3.6	Irisan Kinerja Bidang Pengampu terhadap Kinerja Program
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Pendukung Tahun 2022
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Tabel 3.10	Efisiensi Anggaran 2022
Tabel 3.11	Kegiatan Lintas Sektor Perangkat Daerah dan NGO
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Tahun 2022
Tabel 3.13	Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Gambar 3.1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Multi Stakeholder

Gambar 3.2 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Lokasi Wisata Kelapa  
Tindan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan\
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kaban 2. Sekretaris	1. Dibawah Subbag Umum dan kepegawaian 1) Pengelola Administrasi Pemerintah	1. Perencana Ahli Madya 2. Perencana Ahli Muda 3. Perencana Ahli Pertama

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1) Subbag Umum dan Kepegawaian 2) Subbag Keuangan dan Aset 3) Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program 3. Kabid, Ekonomi 1) Kasubid. Pertanian 2) Kasubid. Perdagangan, Industri dan Investasi 3) Kasubid. Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata 4. Kabid. Penelitian dan Dokumen Perencanaan 1) Kasubid data dan Informasi 2) Kasubid. Penelitian dan Pengembangan 3) Kasubid. Perencanaan Daerah 5. Kabid. Sosial dan Perencanaan 1) Kasubid. Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 2) Kasubid. Pemerintah dan Aparatur 3) Kasubid. Sosial dan Kesehatan 6. Kabid. Sarana dan Prasarana 1) Kasubid. Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur 2) Kasubid. SDA dan Lingkungan Hidup 3) Kasubid. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang 7. Kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 1) Kasubid. Pengendalian Pembangunan 2) Kasubid. Evaluasi dan Analisa Pembangunan 3) Kasubid. Pelaporan	2) Pengelola Kepegawaian 3) Pengadminstrasian Umum 4) Pranata Kearsipan. 2. Dibawah Kasubag. Keuangan dan Aset 1) Bendahara 2) Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan 3) Verifikator Keuangan 4) Pengelola Barang Milik Daerah 3. Dibawah Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 4. Dibawah Kasubid. Pertanian 1) Analis Perencanaan dan kerja sama 2) Pengelola Bahan Perencanaan 5. Dibawah Kasubid. Perdagangan Industri dan Investasi 1) Pengelola Program dan Kegiatan 2) Analis Perencanaan dan Kegiatan 6. Dibawah Kasubid Ketenagakerjaankoperasi dan pariwisata 1) Analis Perencanaan 2) Pengelola Bahan Perencanaan 7. Dibawah Kasubid Data dan Informasi 1) Analis Perencana 2) Pengelola Data 3) Pengolah Data 4) Pengadminstrasian Umum 8. Dibawah Kasubid Penelitian dan Pengembangan 1) Pengelola Pengembangan Sarana IPTEK 2) Analis Penelitian dan Pengembangan 9. Dibawah Kasubid Perencanaan Daerah 1) Analis Rencana Program dan Kegiatan 2) Pengadminstrasian perencanaan dan program 10. Dibawah Kasubid Pendidikan pemuda olahraga dan kebudayaan 1) Analis Informasi pendidikan 2) Analis kebudayaan 3) Analis keolahragaan 11. Dibawah Kasubid pemerintah dan aparaturn 1) Analis rencana pemerintahan Umum	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
	2) Analis Perencana sumber dayamanusia aparatur 12. Dibawah Kasubid Kesehatan dan social 1) Analis kesejahteraan Rakyat 2) Pengelola rencana social dan kesehatan 13. Dibawah kasubid sarana perhubungan dan Infrastruktur 1) Analis pengembangan Infrastruktur 2) Analis Infrastruktur 3) Pengadmistrasian Perencana dan program 14. Dibawah Kasubid SDA dan Lingkungan Hidup 1) Penyusun program dan pengawasan prasarana wilayah dan LH 2) Analis Lingkungan Hidup 15. Dibawah Kasubid pengembangan wilayah dan tata ruang 1) Pengelola pengendalian pemanfaat ruang 2) Analis Pemanfaata ruang 16. Dibawah kasubid pengendalian pembangunan 1) Analis Program pembangunan 2) Pengelola pengendalian, monitoring dan evvaluasi pembangunan 17. Dibawah Kasubid Evaluasi dan Analisa pebangunan 1) Analis monitoring evaliasi dan pelaporan 2) Pengelola monitoring dan evaluasi 3) Analis pembangunan 18. Dibawah kasubid Pelaporan 1) Analis monitoring, evaluasi dan pelaporan 2) Pengolah Data 3) Pengelola Data	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022 yang merubah nama dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Bappeda masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dimana fungsi kepala sub bidang dilimpahkan kepada pejabat fungsional perencana ahli muda dalam fungsi sub koordinator sesuai hasil penyetaraan.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pegawai negeri sipil dan 22 (dua puluh dua) orang sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Tersedia	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S3	S2	S1	D3	SMA	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1		1					1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	6	6			3	3			6	
	2. Pengawas	2	1	1			1	1		2	
	3. Pelaksana	6	4	2			2	1	3	6	22
C	Jabatan Fungsional	20	7	14		8	11	1		20	
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>22</b>

Sumber: Data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Kaban	Kepala Badan	1	1	0
Sekretariat	Sekretaris	1	1	0
Bidang	Kepala Bidang Ekonomi	1	1	0
	Kepala Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan	1	1	0
	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintah	1	1	0
	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	1	0
	Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
Kasubbag.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	Kasubag. Keuangan dan Aset	1	1	0
Fungsional Umum	Pengelola Administrasi Pemerintah	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
	Pengadministrasian Umum	2	0	2
	Pranata Kearsipan	1	0	1
	Bendahara	1	1	0
	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1	0	1
	Verifikator Keuangan	1	0	1
	Pengelola Barang Milik Daerah	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	0	1
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	0	1
	Analisis Perencanaan dan Kerja Sama	1	0	1
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
	Pengelola Program dan Kegiatan	1	0	1
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	3	0	3
	Analisis Perencanaan	2	0	2
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
	Pengelola Data	2	0	2
	Pengolah Data	2	0	2
	Pengelola Pengembangan Sarana IPTEK	1	0	1
	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0	1
	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	3	1	2
	Analisis Informasi Pendidikan	1	0	1
	Analisis Informasi Kebudayaan	1	0	1
	Analisis Keolahragaan	1	0	1
	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	1	0	1
	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0	1
	Analisis Pengembangan Infrastruktur	1	0	1
	Analisis Infrastruktur	1	1	0
	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	2	2	0
	Analisis Lingkungan Hidup	1	0	1
	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	0	1
	Analisis Pemanfaatan Ruang	1	0	1
	Analisis Program Pembangunan	1	0	1
	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1	0	1
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1	0
	Analisis Pembangunan	1	0	1
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
Jabatan Fungsional	Perencana Ahli Madya	2	2	0
	Perencana Ahli Muda	17	17	0
	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>35</b>	<b>41</b>

Sumber: Data Diolah Bappeda

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	1 kapling	400.000.000,00
2	Peralatan & Mesin			
		Alat-alat Angkut (Roda 2 dan Roda 4)	8 unit	698.560.000,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.057.640.300,00
		Alat Studio Komunikasi	12 set	266.841.888,00
		Alat Komputer + Notebook	44 unit	465.678.800,00
		Alat Elektronik Lainnya	39 unit	235.340.000,00
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	5 unit	7.326.727.050,00
		Rumah Dinas	1 unit	66.100.000,00
		Gerbang dan Pintu	3 unit	121.049.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Instalasi Listrik dan Telp	1 jaringan	14.780.000,00
		Jaringan Lainnya	3 Set	100.020.00,00
5	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud		6.472.351.350,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan			-

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

### 1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar pada aspek strategis tersebut jika dipetakan ke dalam sebuah analisis terkair isu strategis maka Bappeda memiliki sebuah peluang dan tantangan ke depan dalam menjalankan fungsinya.

Tabel 1.5 Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Tantangan Organisasi

		Internal	
		Internal	Internal
Eksternal	Internal	KEKUATAN (Strenghts)	KELEMAHAN (Weakness)
		Justifikasi terhadap program kegiatan prioritas merupakan kewenangan BAPPEDA melalui tim TAPD.	Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan program kegiatan pembangunan.
Internal	Internal	Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan kewenangan di setiap bidang inti maupun teknis BAPPEDA.	Masih rendahnya upaya pendokumentasian tahapan pelaksanaan program kegiatan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan.
		Memperkuat kerjasama tim perencanaan dan penganggaran dalam menjustifikasi program kegiatan yang bersifat prioritas.	Menyusun regulasi akuntabilitas kinerja, agar tercipta tata pemerintahan yang demokratis dan transparan.
PELUANG (Opportunities)	Tuntutan akuntabilitas merupakan misi yang harus diwujudkan dalam kebijakan kepala daerah.	Mengoptimalkan teknologi informasi yang tersedia, dan mensinergikan pemanfaatannya agar dapat menyaring aspirasi masyarakat.	Meningkatkan teknologi informasi yang tersedia, agar pemanfaatannya merujuk kepada transparansi kinerja.
	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan.		
	Adanya wadah untuk menyaring aspirasi masyarakat melalui forum maupun teknologi informasi.		
	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi.		
ANCAMAN (Threats)	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya.	Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya	Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya
	Sumber daya manusia yang tidak bekerja sesuai lingkup kerjanya.		
	Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program.		
	Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.		
ANCAMAN (Threats)	Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.	Menyusun petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan tuntutan akuntabilitas kinerja.	Menyusun petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan tuntutan akuntabilitas kinerja.
	Belum stabilnya Sistem Informasi yang sedang dibangun.		
ANCAMAN (Threats)	Belum stabilnya Sistem Informasi yang sedang dibangun.	Merekrut tenaga ahli atau ASN yang membidangi teknologi informasi.	Merekrut tenaga ahli atau ASN yang membidangi teknologi informasi.

Sumber: Reviu Renstra Bappeda 2019

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka Bappeda menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi isu-isu strategis di atas seperti tabel berikut.

Tabel 1.6 Linearitas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	(1) Mendorong terciptanya iklim pencapaian kinerja berbasis target prioritas kinerja. (2) Meningkatkan kualitas alat ukur perencanaan & pengendalian kinerja. (3) Meningkatkan akuntabilitas dengan laporan kinerja berkualitas.	Menata anggaran dan kegiatan perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berbasis prioritas, menata kebijakan perencanaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal, serta menghimpun data hasil pelaksanaan program kegiatan kedalam laporan yang berkualitas.
2	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	(1) Mendorong terciptanya teknologi informasi berbasis data kinerja. (2) Meningkatkan kualitas alat ukur perencanaan & pengendalian kinerja. (3) Meningkatkan akuntabilitas dengan laporan kinerja berkualitas.	Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Perangkat Daerah (PD) se-Kabupaten Kotawaringin Barat berbasis prioritas, serta menata kebijakan perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan menghimpun data hasil perencanaan melalui SIPD.  Meningkatkan validasi data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan. Serta mengkoordinasikan & melaksanakan pengendalian, dan evaluasi kegiatan perencanaan PD se-Kabupaten Kotawaringin Barat serta membuat laporan pemb. daerah yang berkualitas.
3	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang mitra bidang sarana prasarana, ekonomi, dan sosial pemerintahan	(1) Mendorong kegiatan perencanaan dan penganggaran PD mitra kerja berbasis prioritas. (2) Meningkatkan kualitas alat ukur perencanaan & pengendalian kinerja. (3) Meningkatkan akuntabilitas dengan laporan kinerja berkualitas.	Mendampingi, mengarahkan, memonitoring serta mengevaluasi dokumen perencanaan, pengendalian serta pelaporan PD mitra kerja.  Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana.  Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah.

Sumber: *Reviu Renstra Bappeda, 2019*

Berdasarkan strategi dan kebijakan umum tersebut, pada tahun 2022, Bappeda menerapkan kebijakan berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan laporan kegiatan pendampingan perencanaan mitra kerja di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana
2. Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan sistem koordinasi aparaturnya perencanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya perencanaan
6. Memperkuat sistem informasi data perencanaan termasuk mengoptimalkan fungsi penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

#### 1.4 Permasalahan Utama

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Diantaranya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), pencapaian indikator makro dan mikro pembangunan nasional, pencapaian SPM, dan target-target tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang belum tercapai maksimal.

Sementara dari sisi internal sebagai perangkat daerah, BAPPEDA dihadapkan pada tantangan utama yaitu sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, integratif dan keterpaduan perencanaan, berperan sebagai motor penggerak pencapaian indikator-indikator kinerja daerah, sinkronisasi data-data pembangunan dalam rangka penyusunan *Big Data*, modernisasi dan digitalisasi mekanisme perencanaan pembangunan untuk memenuhi kualifikasi inklusif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparaturnya, dan menciptakan motivasi kerja yang kondusif.

Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. kurangnya kompetensi SDM perencana,
2. kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
3. belum ada data spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan;

4. masih terdapat program kegiatan yang tidak signifikan untuk mendukung percepatan pencapaian target indikator yang berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah sehingga secara langsung berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional seperti SPM dan SDGs; serta
5. masih terdapat perencanaan-perencanaan yang sifatnya parsial sehingga munculnya ketimpangan pada pelaksanaan program dan kegiatan.

### 1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran perubahan Renstra pada Tahun 2019-2022 berdasarkan hasil reviu Kementerian PANRB.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN  
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,  
K = KETAKWAAN,  
H = HARMONIS,  
L = LANGGENG,  
A = AMAN,  
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,  
U = UNGGUL,  
R = RELIGIUS,  
A = AMANAH,  
N = NYATA,  
I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **pertama** yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan  
transparan”**

dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah **“Nilai SAKIP Kabupaten”** bersama-sama dengan bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat. Kata kunci dari Visi, Misi dan Sasaran Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja artinya setiap perangkat daerah beserta jajarannya harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Misi tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan, jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dapat berjalan secara konkret dan mendukung sesuai dengan tahapan - tahapan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis. Keselarasan Visi Misi, Sasaran beserta Indikator Sasaran tersebut akan diwujudkan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu dengan menetapkan tujuan yang konsisten dengan pencapaian target RPJMD.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan serta sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022. Di mana sasaran Bappeda seperti pada tabel berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2017-2022

No	Tujuan BAPPEDA	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran BAPPEDA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 20 ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
				17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	80	80	80	90	90	90
		Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80	80	80	90	90	90
2	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas		Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.	80	80	80	90	90	90
		Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80	80	80	90	90	90
		Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80	80	80	90	90	90
3	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Aparatur	80	80	80	90	90	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	80	80	80	90	90	90

Sumber : Dokumen Reviu Renstra BAPPEDA

Selanjutnya, tujuan dan sasaran BAPPEDA Tahun 2019 yang mengalami perubahan narasi, di mana narasi tersebut diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP oleh Kermenpan RB tanggal 13 Agustus 2019 di Palangka Raya tersaji dalam berikut.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2019

No.	Tujuan BAPPEDA	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran BAPPEDA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -2 (2019)
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Aparatur	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	80
2.	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat & akurat	80
		Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan*	80
		Meningkatnya kualitas pengendalian indikator perencanaan daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	80
3.	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil evaluasi analisa bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80

Sumber : Dokumen Reviu Renstra BAPPEDA

Kemudian untuk lebih memfokuskan kepada tercapainya sasaran strategis daerah sesuai dengan Perbup 30 Tahun 2020, maka di tahun 2020-2022 sekali lagi terjadi perubahan indikator. Gambaran mengenai tujuan dan sasaran BAPPEDA maka pada tahun 2020-2022 terdapat 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dibedakan menjadi unsur pendukung dan unsur utama yang diharapkan target kerjanya dapat tercapai setiap tahun. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Tahun 2020-2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2020	2021	2022
<b>Unsur Pendukung</b>						
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Kepuasan Aparatur	%	100	100	100

	- Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang PD	%	100	100	100
	- Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75	80	80
<b>Unsur Utama</b>						
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan berkualitas baik	%	100	100	100

Sumber: Reviu Renstra Bappeda Tahun 2019-2022

Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, telah menyebabkan terjadinya perubahan program dan kegiatan yang menjembatani pencapaian indikator sasaran strategis, tetapi sasaran strategis sendiri tidak berubah.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.4 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai berdasarkan LKE Instansi Pengawas (Inspektorat)	Kepala Bappeda	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan berkualitas baik	Persentase rata-rata SKPD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas* = (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3	Kepala Bappeda	

Sumber: SK Kepala Bappeda No. 050/01.1/Bapp-1/2019 Tahun 2019

Di mana kriteria perencanaan yang berkualitas\* adalah memenuhi, syarat :

1. Renstra SKPD: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD,
2. Renja SKPD: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. Renja memiliki kausalitas dengan Renstra dan RKPd., dan
3. RKA SKPD: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. RKA memiliki kausalitas dengan Renja.

### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 tertuang dalam Tabel 2.5.

Tabel: 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan berkualitas baik	100%

Sumber: RKT Perubahan Bappeda, 2022

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai Tabel 2.6.

Tabel: 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan berkualitas baik	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>				
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>		<b>1.224.269.200</b>	<b>1.253.366.100</b>	<b>29.096.900</b>
1	Penyusunan Perenc, dan Pendanaan	770.378.400	768.205.650	(2.172.750)
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	55.185.000	450.000	(54.735.000)
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.540.000	12.400.000	(6.140.000)
	Koordinasi pelaks. Forum SKPD/Lintas SKPD	49.940.000	38.775.000	(11.165.000)
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/kota	72.570.000	38.855.000	(33.715.000)
	Koord. Penys. Dan penetapan Dok. Prenc. Pembg. Daerah kab/kota	574.143.400	677.725.650	103.582.250
2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bid. Perc. Pembg. Daerah	106.699.800	106.809.450	109.650
	Analisis data dan informasi perc. Pembg. Daerah	47.749.800	41.159.600	(6.590.200)
	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perc. Pembg. SKPD	58.950.000	65.649.850	6.699.850
3	Pengend, evaluasi dan pelaporan bid. Perc. Pembg. Daerah	347.191.000	378.351.000	31.160.000
	Koord. Pengend perenc dan pelaks. Pembg. Daerah di kab/kota	204.600.000	238.960.000	34.360.000
	Monitoring, evaluasi dan penys. lap. berkala pelaks. Pembg. Daerah'	142.591.000	139.391.000	(3.200.000)
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan</b>		<b>1.043.143.450</b>	<b>983.731.500</b>	<b>(59.411.950)</b>
1	Koordinasi Perencanaan Bid. Pemerintahan dan Pembg. Manusia	291.572.150	299.998.700	8.426.550
	Koord. Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.209.900	46.630.900	13.421.000
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pemerintahan	42.003.600	44.812.600	2.809.000
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerahbid. Pemerintahan	19.999.900	6.578.600	(13.421.300)
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Pemerintahan	48.979.850	48.979.850	0
	Koord. Penys. dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Pembg. manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.569.550	22.569.550	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pembg. Manusia	74.892.200	80.510.200	5.618.000
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Pembg. Manusia	19.999.950	4.371.800	(15.628.150)
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Pembg. Manuasia	29.917.200	45.545.200	15.628.000
2	Koord. Perenc. Bid. Perekonomian dan SDA (sumber Daya Alam	316.571.900	310.141.400	(6.430.500)
	Koord. Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD	46.841.000	49.650.000	2.809.000
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Perekonomian	36.668.450	39.477.450	2.809.000
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Perekonomian	28.410.000	12.814.500	(15.595.500)
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Perekonomian	42.014.550	52.473.550	10.459.000
	Koord. Penys. dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD	49.649.850	49.649.850	0
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. SDA	36.668.450	39.477.450	2.809.000
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. SDA	28.410.000	7.625.000	(20.785.000)
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. SDA	47.909.600	58.973.600	11.064.000
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	434.999.400	373.591.400	(61.408.000)
	Koord. Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD	67.664.050	67.664.050	0
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Infrastruktur	26.425.100	26.425.100	0
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat darahbid. Infrastruktur	18.105.850	18.105.850	0
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Infrastruktur	174.593.750	154.445.750	(20.148.000)
	Koord. Penys. dok. Perc. Pembg. Perangkat Daerah bid. Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	35.905.950	35.905.950	0
	Asistensi Penys. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Kewilayahan	13.060.150	13.060.150	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pelaks. Monitoring dan evaluasi peny. Dok. Perc. Pembg. Perangkat daerah bid. Kewilayahan	18.320.000	18.320.000	0
	Koord. Pelaks. Sinergitas dan harmonisasi perc. Pembg. Daerah bid. Kewilayahan	80.924.550	39.664.550	(41.260.000)
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>		<b>689.266.850</b>	<b>611.376.360</b>	<b>(77.890.490)</b>
1	Penelitian dan pengemb. Bid. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	571.239.95	463.354.450	(107.885.500)
	Fasilitasi, pelaks. Dan Pengmb. Bid. Pemerintahan umum	570.149.950	370.149.950	(200.000.000)
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	1.090.000	93.204.500	92.114.500
2	Penelitian dan pengemb. Bid. Ekonomi dan pembg.	3.450.000	3.450.000	0
	Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	3.450.000	3.450.000	0
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	114.576.900	144.571.910	29.995.010
	Penelitian, pengemb. Dan perekayasaan di bid. Teknologi dan Inovasi	114.576.900	144.571.910	29.995.010

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Selain program utama yang terkait langsung dengan sasaran utama kinerja Bappeda Tahun 2022, program dan kegiatan penunjang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel: 2.8 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran 2: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah</b>				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>7.367.324.500</b>	<b>8.239.943.040</b>	<b>872.618.540</b>
I	Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.131.000	60.541.000	(1.590.000)
	Penyusunan Dok. Prenc. Perangkat Daerah	35.729.900	34.139.900	(1.590.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA SKPD	3.999.750	3.999.750	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA Perubahan SKPD	3.999.750	3.999.750	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA SKPD	2.875.000	2.875.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA Perubahan SKPD	2.875.000	2.875.000	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD	12.651.600	12.651.600	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.835.734.978	5.337.374.584	501.639.606
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.800.263.278	5.303.552.884	503.289.606
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.149.800	6.149.800	0
	Koordinasi Penyusn. Laporan Keuangan akhir thn	28.168.400	26.518.400	(1.650.000)
	Koordinasi dan penyus. Lap keu. Bln/triwulan/semesteran SKPD	1.153.500	1.153.500	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.615.700	1.615.700	0
	Penyusunan Pernc. Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	645.000	645.000	0
	Penatausahaan Barag Milik Daerah pada SKPD	970.700	970.700	0
4	Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan . Perangkat Daerah	525.000	525.000	0
	Pengolahan data Retribusi daerah	525.000	525.000	0
5	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.176.000	148.508.550	56.332.550
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya	20.400.000	20.400.000	0
	Pendidikan dan pelatihan peg. Berdsrkan tgs dan fungsi	10.840.000	0	(10.840.000)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.136.000	0	(11.136.000)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang- undangan	49.800.000	128.108.550	78.308.550
6	Administrasi umum perangkat daerah	432.241.114	580.923.419	148.682.305
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr.	19.996.081	34.399.260	14.403.179
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan ktr	68.502.049	68.502.049	0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	58.667.292	92.703.318	34.036.026
	Penyediaan bahan logistik ktr	6.666.000	6.666.000	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.746.792	27.746.792	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.598.000	350.906.000	100.308.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.315.922	125.119.729	(105.196.193 )
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya7	230.315.922	125.119.7298	(105.196.193 )
8	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	660.652.540	693.687.540	33.035.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000	520.000	0
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	145.027.040	145.027.0400	0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	515.105.500	548.140.500	33.035.000

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
9	Pemeliharaan barang Milik daerah penuj. Urusan pem. daerah	1.051.932.246	1.291.647.518	239.715.272
	Penyediaan jasa biaya pemeliharaan dan pajak kend. Perorg dns atau kend. Dns jbtan	41.490.000	41.490.000	0
	Penyediaan jasa biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kend. Opr. Atau lapangan.	64.710.000	60.352.500	(4.357.500)
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	47.450.000	71.981.000	24.531.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	585.907.465	627.170.050	41.262.585
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.374.781	490.653.968	178.279.187

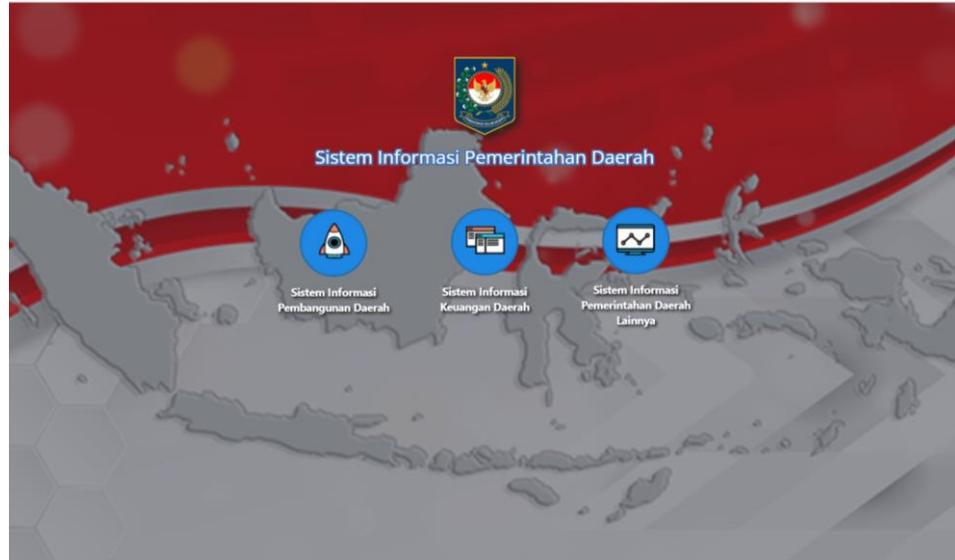
Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

### Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu pencapaian target kinerja, khususnya pengendalian pada ketepatan, keakuratan, dan keselarasan perencanaan, yaitu:

#### **SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)**

Aplikasi milik Kementrian Dalam Negeri digunakan oleh seluruh kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan mengintegrasikan data. Bappeda menggunakan aplikasi ini sebagai perangkat yang mendukung proses perencanaan pembangunan.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id/>

Gambar 2.1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Aplikasi SIPD menggiring perencanaan mulai dari desa hingga kabupaten, termasuk di dalamnya perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

#### 3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Pada tahun 2022, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 3 (tiga) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	77,25 (hasil penilaian kinerja 2021)	-	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Bappeda, Desember 2022

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

**1 Sasaran Utama: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Indikator Kinerja: Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik**

Sasaran utama ini didukung oleh tiga program (1) perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, (2) program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah serta (3) program penelitian dan pengembangan di mana muara dari capaian ketiganya adalah tujuan meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2022 Bappeda telah menghasilkan 6 (enam) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu: Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2022, Rencana Strategis Bappedalitbang Tahun 2023-2026, Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Tahun 2023, dan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2022.

Bappeda telah menyelesaikan tahapan perencanaan, dokumen perencanaan yang telah disusun juga telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah, dokumen tersebut dapat dikatakan tepat dan selaras sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya sehingga ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah.

Akan tetapi, keakuratan dokumen belum dapat dihitung secara menyeluruh. Keberhasilan dapat dihitung setelah dilaksanakan pada tahun berikutnya, di mana akan terlihat bahwa indikator-indikator kinerja pada dokumen RKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Secara umum ketepatan dan keakuratan **penyusunan** dokumen perencanaan jika ditelaah berdasarkan waktu penyusunan dan muatan keselarasan isi telah diawasi melalui kegiatan verifikasi, koordinasi, dan asistensi oleh bidang teknis dan mendapatkan revidi dari instansi pengawasan.

Berdasarkan target kinerja utama yang diperjanjikan maka perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja utama tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Utama 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik*	%	100	100	100%

Sumber: Data diolah

Berdasar pada dokumen revidi Renstra BAPPEDA tahun 2019, Kriteria dokumen perencanaan yang berkualitas\* adalah jika dokumen perencanaan Perangkat Daerah memenuhi, syarat :

- Renstra SKPD:** 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD,
- Renja SKPD:** 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat

- dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. Renja memiliki kausalitas dengan Renstra dan RKPD., dan
3. **RKA SKPD**: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. RKA memiliki kausalitas dengan Renja.

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Bappeda mencapai target sesuai dengan yang diperjanjikan dengan capaian 100%, artinya rata-rata seluruh perangkat daerah memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik.

Maka secara umum seluruh dokumen yang dikerjakan oleh PD, baik Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026, Rencana Kinerja (Renja) 2023, dan Rencana Kinerja Perubahan (Renja Perubahan) 2022 yang disusun pada tahun 2022 termasuk dalam dokumen perencanaan berkualitas<sup>1</sup> baik.

Selain itu Mitra PD di Bappeda telah melaksanakan telaahan atas dokumen perencanaan menggunakan karta kerja bantu untuk menilai kualitas dokumen. Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut didapatkan bahwa kualitas dokumen perencanaan walaupun beragam nilainya tetap masuk dalam kategori berkualitas baik.

Bidang Mitra PD pun telah selesai menyelenggarakan asistensi, pengendalian, dan evaluasi pada penyusunan dokumen perencanaan OPD. Dari 38 Perangkat Daerah yang menjadi mitra BAPPEDA dalam penyelenggaraan penyusunan RKPD 2023, keseluruhan telah berhasil menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik. Sesuai dengan urutan pelaksanaan perencanaan yang diasistensi, dikoordinasi, dan dikendalikan oleh Bappeda sebagai mitra penyusunan dokumen perencanaan.

Capaian sasaran tersebut berbanding lurus dengan capaian tujuan meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah. Yang didukung oleh kualitas perencanaan.

---

<sup>1</sup> Berkualitas sesuai dengan definisi operasional dalam Reviu Renstra BAPPEDA, 2019

Keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh:

- Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan;
- Kondisi kerja yang kondusif sehingga memudahkan koordinasi baik internal maupun lintas PD;
- Meningkatnya pemahaman Mitra bidang PD sehingga mampu melakukan verifikasi, asistensi, monev kepada PD penyusun dokumen perencanaan dengan baik;
- Pengendalian aplikasi SIPD yang optimal sehingga masalah dan kendala teknis yang terjadi dapat segera diselesaikan dan mendukung pencapaian target waktu penyusunan dokumen perencanaan;
- Dukungan sarana prasarana dan anggaran yang optimal untuk melaksanakan kegiatan;

Dari Tabel 3.3, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Utama Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Bappeda selama tiga tahun terakhir telah berhasil mencapai target 100% sesuai dengan kriteria kualitas dokumen perencanaan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda. Walaupun secara detail masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam kualitas dokumen perencanaan baik di level kabupaten dan level perangkat daerah.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Utama sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan*	80%	80%	80%				80%	90%	90%			

Sumber: Data diolah

\*Aspek kualitas dalam dokumen perencanaan (Indikator 2017-2019), harus memenuhi 3 (tiga) kriteria :

1. Persentase SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dg RPJMD,
2. Persentase SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPd, dan
3. Persentase keselarasan penyusunan RKPd dengan RPJMD.

Sedangkan, dokumen perencanaan yang berkualitas\* adalah memenuhi, syarat :

1. Renstra SKPD: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. Renstra memiliki kausalitas dengan RPJMD,
2. Renja SKPD: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. Renja memiliki kausalitas dengan Renstra dan RKPd., dan
3. RKA SKPD: 1. Indikator kinerja dan target kinerja pada renstra dan renja dirumuskan secara SMART yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, selaras, memiliki batasan waktu; 2. Berorientasi outcome; 3. RKA memiliki kausalitas dengan Renja.

Dari capaian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa target akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan rata-rata capaian 100% dari keseluruhan target pada tahun 2022, di mana kegiatan-kegiatan berhubungan dengan Penyusunan Rencana dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah; dan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Beberapa kendala yang masih dialami adalah:

- Terjadi kendala dalam pencairan pertanggungjawaban sehingga realisasi penganggaran mengalami pemunduran jadwal
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan. Namun, jadwal pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana sehingga terjadi keterlambatan pelaporan.

Kegiatan yang mendukung program adalah :

- Penyusunan Rencana dan Pendanaan
- Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini merupakan program yang menjadi tanggung jawab bersama Bidang Penelitian dan Perencanaan bersama Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian 100% dari keseluruhan target pada tahun 2022 di mana pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; bidang ekonomi dan sumber daya alam; bidang infrastruktur dan kewilayahan telah berhasil menyelesaikan target kinerja tahun 2022 yang menyangkut koordinasi penyusunan dokumen perencanaan strategis 2023-2026, dokumen perencanaan kinerja 2023, dan dokumen perencanaan perubahan tahun 2022. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen, dan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Bidang teknis telah banyak menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung keterpaduan perencanaan lintas bidang.

Kegiatan berdasarkan nomenklatur Kepmendagri 50 Tahun 2021 yang dilaksanakan dan mendukung program adalah :

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia diampu oleh Bidang Sosial Pemerintahan
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam diampu oleh Bidang Ekonomi
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diampu oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Program ini merupakan program yang menjadi tanggungjawab tiga bidang teknis, yaitu Bidang Sosial Pemerintahan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sarana Prasarana

3. Program Penelitian Pengembangan memiliki capaian 100% dari keseluruhan target pada tahun 2022, di mana kegiatan dilaksanakan untuk mencapai target untuk menyusun beberapa dokumen penelitian dan kajian.

Kegiatan yang mendukung program adalah :

- Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan
- Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi Dan Teknologi

Program ini menjadi tanggung jawab Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan.

Pada tahun 2022, Bappeda telah merangkung sebuah irisan kinerja antar Bidang terkait dengan pencapaian target indikator kinerja utama. Irisan tersebut menggambarkan bagaimana peran bidang yang sebelumnya bertanggung jawab langsung dalam berjalannya sebuah program, saat ini harus melaksanakan program secara sinergi.

Irisan kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.6 Irisan Kinerja Bidang Pengampu terhadap Kinerja Program

Program		Kegiatan		Bidang Pengampu
Nama Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Perencanaan Daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD	Penyusunan Rencana Dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	Bidang Penelitian dan Perencanaan Bidang Penelitian dan Perencanaan
		Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang disusun dan Dokumen data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	
		Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Mitra BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik*	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah laporan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menunjang konsistensi PPD dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bidang Sarana Prasarana
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda	Jumlah laporan Sub Bidang Perekonomian dan SDA dalam menunjang konsistensi PPD dan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Bidang Ekonomi dan SDA
		Koordinasi Perencanaan	Jumlah Laporan Sub Bidang	Bidang Sosial Pemerintahan

		Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Pemerintahan dan pembangunan manusia dalam menunjang konsistensi PPD dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase SKPD yang menyusun inovasi daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Bidang Penelitian dan Perencanaan
		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	
		Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Jumlah laporan inovasi dan teknologi	

Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Bappeda 2022

Selama tahun 2022, kegiatan yang diselenggarakan bidang telah mencapai targetnya sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - 100% Perangkat Daerah telah memuat dukungan sasaran yang selaras dengan RPJMD
  - 3 Dokumen Perencanaan telah ditetapkan, yaitu RPD 2023-2026, RKPD 2023, dan RKPD Perubahan 2022
  - 1 Dokumen Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pengumpulan satu data
  - 9 Dokumen pengendalian
  
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

- 100% Perangkat daerah telah menyajikan dokumen perencanaan berkualitas baik\*
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD dan RKPD) per Bidang Teknis (Sarana Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Pemerintahan) telah dilaksanakan sebanyak 92 kali
- Asistensi Penyusunan Dokumen PPD (RPD dan RKPD) per Bidang Teknis (Sarana Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Pemerintahan) telah dilaksanakan sebanyak 88 kali
- Monev Penyusunan PPPD per Bidang Teknis (Sarana Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Pemerintahan) telah dilaksanakan sebanyak 55 kali
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD per Bidang Teknis (Sarana Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Pemerintahan) telah dilaksanakan sebanyak 94 kali

### 3. Program Penelitian dan Pengembangan

Beberapa kegiatan penting yang telah dilakukan Bappeda sebagai implementasi penerapan kebijakan tahun 2022 adalah:

1. Rapat Orientasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka kesamaan persepsi untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Konsinyering Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diikuti oleh Sekretaris dan Perencana Perangkat Daerah
3. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah melalui, koordinasi, asistensi, dan monitoring.
4. Fasilitasi pelaksanaan penyusunan penjenjangan kinerja strategis pada Perangkat Daerah sampel oleh akademisi/universitas dalam rangka perbaikan rencana kerja dan pemurumusan pohon kinerja untuk penyelarasan perencanaan.

5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan desk paparan hasil pelaksanaan rencana kinerja dan efisiensi per triwulan
6. Melaksanakan evaluasi berkala triwulanan dalam FGD subsektor pembangunan, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang ekonomi dan sumberdaya manusia.
7. Fasilitasi pelaksanaan penyertaan pendanaan pembangunan dari pihak swasta melalui mekanisme penyaluran CSR. Bappeda melakukan inisiasi kerjasama PD dan Perusahaan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang tidak mendapatkan pendanaan dari APBD maupun APBN.
8. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra pembangunan (NGO) dalam rangka sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung rencana pembagunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
9. Pelaksanaan proses perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dimulai dari penjaringan aspirasi melalui Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Forum RKPD hingga Konsultasi Publik.

Akan tetapi masih terdapat beberapa catatan penting dalam pencapaian kualitas dokumen perencanaan ke depan,yaitu:

1. perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrumen yang lebih operasional terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagai Langkah antisipasi pelaksanaan RPD 2023-2026;
2. perlu dipertimbangkan pemberian reward dan punishment atas capaian program dan sasaran dari IKU PD berupa pemberian Tambahan Tunjangan Penghasilan;
3. mendorong kinerja PD pengampu program utama pembangunan dalam mencapai target yang sudah disepakati dan melakukan desk diskusi untuk menyamakan persepsi dalam memahami definisi

operasional indikator program sehingga kualitas dokumen perencanaan PD.

4. perlu penguatan sistem satu data pembangunan, baik dari segi personil pengolah data, penyimpanan data, dan pemahaman pengguna dan pemilik data akan pentingnya data sebab belum sepenuhnya data dan informasi yang diperoleh dan dimiliki, ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan (evidence base policy).

**2**

**Sasaran Pendukung : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah**

**Indikator kinerja sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Peningkatan capaian Nilai SAKIP adalah sasaran pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, yang memuat sembilan kegiatan.

Capaian kinerja tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Pendukung Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	77,25	Tidak Tercapai

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Pendukung Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,33	75,53	77,25	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber: Data diolah

Telah terjadi peningkatan nilai SAKIP yang diperoleh BAPPEDA atas Akuntabilitas yang diselenggarakan hal itu menunjukkan telah terjadi perbaikan

sistem kerja yang signifikan sehingga terjadi penambahan nilai dari periode sebelumnya. Nilai SAKIP BAPPEDA tahun 2022 untuk penilaian atas kinerja 2021 BAPPEDA berdasarkan catatan hasil evaluasi adalah 77,25 sedangkan pada tahun 2021 penilaian atas kinerja 2020 BAPPEDA memperoleh nilai 75,53. Kelemahan Bappeda terletak pada nilai pengendalian. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengendalian adalah :

- Lemahnya proses pengarsipan dokumen hasil kerja dalam satu ruang;
- Disiplin yang kurang dalam mengunggah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- Belum adanya aplikasi yang mumpuni dan memudahkan dalam melakukan evaluasi internal pelaksanaan kinerja sehingga bukti dukung yang diharapkan mampu menjadi nilai tambahan dalam penilaian evaluasi kinerja sulit didapat
- ESakip yang digunakan belum dapat mengakomodir proses pengendalian yang dilakukan.

Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat drive khusus untuk menyimpan dokumen bukti pelaksanaan kerja;
2. Membuat jadwal pekerjaan bulanan sebagai pengingat tenggat waktu pelaporan;
3. Memaksimalkan aplikasi eSAKIP;
4. Menunjuk personil khusus untuk mengawasi dokumen bukti dukung pengendalian target;
5. Merubah sistem kerja mengikuti prinsip BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
6. Menyusun ulang penjenjangan kinerja sebagai proses perbaikan

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja, sasaran ini didukung oleh pendanaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah, khususnya

pada kegiatan yang langsung menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Ketiga kegiatan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi akuntabilitas walaupun beberapa kegiatan lain seperti administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan barang jasa, penyediaan jasa layanan kantor, dan pemeliharaan termasuk dalam program yang sama. Enam kegiatan yang disebutkan hanya merupakan kegiatan pendukung yang tidak secara langsung memengaruhi pencapaian sasaran akuntabilita.

Rata-rata realisasi pada tiga kegiatan tersebut mencapai angka 98,78% terhadap keseluruhan target capaian tahunan dengan predikat sangat tinggi. Namun, kinerja kegiatan tersebut belum mampu mendongkrak kinerja sasaran pendukung Bappeda di mana ternyata capaian kinerja kegiatan tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja organisasi.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pendukung sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Perangkat Daerah				75	80	85				80,33	75,53	77,25

Sumber: Data diolah

Dari capaian pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa target akhir Renstra untuk indikator Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**. Telah

terjadi penurunan capaian Nilai SAKIP dari tahun 2020, walaupun nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Belum ada kinerja per sasaran yang dapat disandingkan dengan Standar Nasional.

### 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran I

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.10 Efisiensi Anggaran 2022

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	100%	100%	100	2.848.473.960	2.756.260.676	96,76	3,24
<b>Total efisiensi anggaran</b>								<b>3,24</b>

Sumber: Data diolah Bappeda

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena adanya kolaborasi kegiatan antar bidang, sehingga beban anggaran dapat dibagikan, khususnya untuk sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan rapat lintas bidang yang dipusatkan pada satu kegiatan cukup menghemat anggaran, sehingga kinerja bidang tetap optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih sedikit sehingga lebih efisien.

Selain dari sisi anggaran, Bappeda juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral, baik bersama unit kerja lain (Perangkat Daerah) maupun bersama mitra pembangunan (NGO/Ormas). Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja sehingga langsung maupun tidak langsung mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya manusia dan crosscutting pencapaian target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.11 Kegiatan Lintas Sektor Perangkat Daerah dan NGO

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Evaluasi SAKIP	Bappeda Organisasi	Fasilitasi Pendampingan dan penyusunan Renja Pelaporan capaian kinerja	Dokumen Pengendalian	Mendukung pencapaian target kinerja tujuan Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan Pembangunan
2	Perencanaan Penganggaran pengarusutamaan Gender	Bappeda BPKAD	Fasilitasi penyusunan anggaran GBS	Dokumen PPRG	
		DP3AP2KB	Penyusunan Rencana Aksi PPRG		
		Organisasi	Pelaporan capaian kinerja		
		BPKAD	Keuangan dan Aset		
		Organisasi	Penjaminan Kesesuaian Kelembagaan		
	Inspektorat	Penjaminan Kualitas			
4	Verifikasi Perencanaan dan Penganggaran	BPKAD	Verifikator Kesesuaian Anggaran dan Belanja	Dokumen RKA sebagai dasar untuk Dokumen APBD	
		Bagian Pengadaan Barang Jasa	Verifikator Kesesuaian Jenis Pengadaan dalam rencana pelaksanaan anggaran		
5	Peningkatan SDM	LPK Enter	Pelaksana pendidikan keterampilan menuju lembaga berkualitas internasional	Dokumen Kerjasama (MOU)	
6	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Strategis	NGO	Tenaga teknis pendukung penyusunan dokumen	Dokumen KLHS	
7	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas PU PR	Penyusun dokumen	Dokumen Tata Ruang	
		NGO	Tenaga teknis pendun penyusunan dokumen		
8	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Perkebunan	NGO	Mitra penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen Rencana Induk	

Sumber: Data diolah Bappeda

Sebagai unit organisasi yang menjalankan fungsi koordinasi Bappeda cukup banyak menjalankan kegiatan lintas sektor yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut lebih kepada dukungan bagi instansi teknis yang membidangi pekerjaan-pekerjaan khusus dengan target kinerja khusus sehingga efisiensi yang terjadi langsung menjadi bagian unit organisasi teknis.

### 3.5 Inovasi/Pengembangan Layanan

Selama tahun 2022, Bappeda telah melakukan beberapa hal baru sebagai pengembangan sistem kerja untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi pembangunan yang mendukung tujuan meningkatkan ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan.

Hal-hal yang dilakukan sebagai berikut:

1. Rakordal Tematik

Rapat koordinasi pengendalian yang selama ini hanya memaparkan hasil-hasil kinerja perangkat daerah serta capaian serapan anggaran per triwulan pada tahun 2022 dikemas dalam bentuk yang berbeda dengan menghadirkan narasumber untuk membahas satu tema tertentu yang terkait dengan indikator pembangunan daerah. Salah satunya adalah Rakordal triwulan II yang mengusung tema, 'Hilirisasi produk dan pengembangan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi'.

2. Desk Pengendalian Renja

Pada tahun 2022, Bappeda melakukan cara baru untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang diselenggarakan OPD dengan membuat Desk Pengendalian.

Dialokasikan waktu khusus bagi PD untuk menyampaikan laporannya dan menjelaskan kendala serta hambatan.

Bahkan Bappeda membuat format laporan seragam untuk memantau pencapaian target triwulan.

3. Drive Laporan Pengendalian

Bappeda membuat drive khusus bagi perangkat daerah yang bisa diakses sebagai tempat untuk menyampaikan laporannya.

Penggunaan drive ini sebagai cara untuk mempermudah PD dan Bappeda dalam pengumpulan data dan pendokumentasian informasi.

4. Kertas Kerja Penilaian Dokumen Perencanaan

Selama ini penilaian kualitas Dokumen Perencanaan hanya dilakukan berdasarkan kriteria kesesuaian dan ketermuatan tema, direktif penugasan, keaktifan penyampaian dokumen. Tahun 2022 (*setelah diujicobakan pada tahun 2021*) Bappeda mencoba menggunakan kertas kerja khusus untuk membantu menilai kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah. Mitra bidang PD menilai dokumen perencanaan secara kualitatif dan dikuantifikasikan dalam sebuah nilai tertentu. Ke depan, format ini akan diuji secara resmi dan ditetapkan.

5. Collaborative Development Planning

Perencanaan Kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Perencanaan Pembangunan kolaborasi bukan merupakan cara baru, tetapi pada tahun ini Bappeda mencoba mensinergikan perencanaan bersama dengan mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lintas sektor. Bappeda telah melakukan serangkaian koordinasi bersama Kaleka (dulu Inobu), Usaid 'Segar', dan NGO lainnya bersama-sama dengan dinas teknis untuk menyusun perencanaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Saat ini sedang dilakukan inisiasi untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Area Pembangunan Terintegrasi.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Multi Stakeholder

#### 6. Gawi Bahaum

Gawi Bahaum adalah program pemberdayaan masyarakat desa berkelanjutan dalam rangka mengembangkan potensi desa berbasis lingkungan. Di mana program ini merupakan program kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama dengan mitra pembangunan termasuk pelibatan instansi teknis, khususnya Dinas Pertanian.

#### 7. CSR Collaborative

Kegiatan kolaborasi untuk optimalisasi penggunaan dana CSR agar lebih terarah dan berfokus pada dukungan pencapaian tujuan pembangunan yang menjadi misi Rencana Pembangunan Daerah. Dalam kegiatan ini

Bappeda menjalankan fungsi koordinasi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengendali pelaksanaan kegiatan.

#### 8. Musrenbang Kecamatan berlokasi Wisata

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tidak dilokasikan hanya di gedung kecamatan, tetapi mengambil tempat-tempat wisata. Bappeda memberikan usulan dan inisiasi kepada pihak kecamatan untuk menggelar acara tersebut di lokasi wisata sebagai bagian promosi dengan menggandeng pelaku pariwisata. Selain itu juga pada acara ini, disarankan untuk memunculkan pameran mini sebagai wadah promosi produk oleh pelaku UMK.

Salah satunya adalah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kumai yang berlokasi di tempat wisata 'Kelapa Tindan'.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Lokasi Wisata Kelapa Tindan

### 3.6 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp 10.324.004.000,- pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp

11.088.417.000,- Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 10.747.344.747,00 atau sebesar 96,92%. Data anggaran dan realisasi DPPA Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel: 3.12 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	<b>Belanja Operasional</b>	<b>9.889.679.111,-</b>	<b>9.565.338.047,-</b>	<b>96,72</b>
	- Belanja Pegawai	5.303.552.884,-	5.139.853.109,-	96,91
	- Belanja Barang/Jasa	4.586.126.227,-	4.425.484.938,-	96,50
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.198.737.889,-</b>	<b>1.182.006.700,-</b>	<b>98,60</b>
	- Belanja Peralatan & Mesin	146.015.682,-	140.482.000,-	96,21
	- Belanja Gedung & Bangunan	1.052.722.207,-	1.041.524.700,-	98,94
	<b>TOTAL</b>	<b>11.088.417.000,-</b>	<b>10.747.344.747,-</b>	<b>96,92</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan pada DPPA disajikan dalam Tabel 3.7. Secara keseluruhan anggaran yang disediakan mampu terserap dengan sangat baik.

Tabel: 3.13 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
<b>BAPPEDA</b>	<b>11.088.417.000</b>	<b>10.747.344.747</b>	<b>96,92</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.239.943.040</b>	<b>7.991.084.071</b>	<b>96,98</b>
KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<b>60.541.000</b>	<b>44.826.600</b>	<b>74,04</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.139.900	18.426.550	53,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	3.999.750	3.999.750	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.999.750	3.999.750	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	2.875.000	2.874.650	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.875.000	2.875.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.651.600	12.650.900	99,99

<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>5.337.374.584</b>	<b>5.169.563.359</b>	<b>96,86</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.303.552.884	5.139.853.109	96,91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.149.800	5.598.750	91,04
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.518.400	22.958.000	86,57
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.153.500	1.153.500	100,00
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.615.700</b>	<b>1.615.700</b>	<b>100,00</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	645.000	645.000	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	970.700	970.700	100,00
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>100,00</b>
Pengolahan Data Retribusi Daerah	525.000	525.000	100,00
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>148.508.550</b>	<b>141.129.162</b>	<b>95,03</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	20.400.000	20.400.000	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	128.108.550	120.729.162	94,24
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>580.923.419</b>	<b>568.375.452</b>	<b>97,84</b>
Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	34.399.260	27.568.100	80,14
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.502.049	68.127.604	99,45
Penyediaan Peralatan RT	92.703.318	88.058.500	94,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.666.000	6.540.000	98,11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.746.792	27.188.650	97,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.906.000	350.892.598	100,00
<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>125.119.729</b>	<b>120.797.000</b>	<b>96,55</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	125.119.729	120.797.000	96,55
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>693.687.540</b>	<b>682.584.553</b>	<b>98,40</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	145.027.040	143.467.844	98,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.140.500	539.116.709	98,35
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.291.647.518</b>	<b>1.261.667.245</b>	<b>97,68</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.490.000	39.575.235	95,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.352.500	50.154.100	83,10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	71.981.000	66.631.000	92,57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	627.170.050	618.350.810	98,59
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	490.653.968	486.956.100	99,25
<b>Urusan Perencanaan</b>	<b>2.237.097.600</b>	<b>2.147.090.794</b>	<b>95,98</b>
<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.253.366.100</b>	<b>1.241.894.315</b>	<b>99,08</b>
<b>KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PENDANAAN</b>	<b>768.205.650</b>	<b>766.180.665</b>	<b>99,74</b>
Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan Isu strategi Pembangunan Daerah	450.000	450.000	100,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	12.400.000	12.400.000	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	38.775.000	38.600.000	99,55
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	38.855.000	38.805.000	99,87
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	677.725.650	675.925.665	99,73
<b>KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>106.809.450</b>	<b>106.234.540</b>	<b>99,46</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	41.159.600	40.951.680	99,49
Pembinaan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	65.649.850	65.282.860	99,44
<b>KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>378.351.000</b>	<b>369.479.110</b>	<b>97,66</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten	238.960.000	234.137.401	97,98
Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	139.391.000	135.341.709	97,10
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>983.731.500</b>	<b>905.196.479</b>	<b>92,02</b>
<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>299.998.700</b>	<b>296.135.638</b>	<b>98,71</b>

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.630.900	46.620.850	99,98
Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Pemerintahan	44.812.600	44.150.148	98,52
Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Pemerintahan	6.578.600	6.504.600	98,88
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Pemerintahan	48.979.850	47.759.350	97,51
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.569.550	21.815.950	96,66
Asistensi Penyusunan Dokumen PPD Bidang Pembangunan Manusia	80.510.200	79.740.740	99,04
Pelaksanaan Monev Penyusunan PPD Bidang Pembangunan Manusia	4.371.800	4.338.800	99,25
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Pembangunan Manusia	45.545.200	45.205.200	99,25
<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA</b>	<b>310.141.400</b>	<b>304.720.969</b>	<b>98,25</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.650.000	48.299.598	97,28
Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Perekonomian	39.477.450	39.227.798	99,37
Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Perekonomian	12.814.500	12.591.850	98,26
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Perekonomian	52.473.550	52.147.951	99,38
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.649.850	48.775.874	98,24
Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang SDA	39.477.450	38.314.698	97,05
Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang SDA	7.625.000	7.501.850	98,38
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang SDA	58.973.600	57.861.350	98,11
<b>KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>373.591.400</b>	<b>304.339.872</b>	<b>81,46</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.664.050	66.046.529	97,61
Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Infrastruktur	26.425.100	17.900.100	67,74
Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Infrastruktur	18.105.850	10.781.850	59,55
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Infrastruktur	154.445.750	125.505.603	81,26

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.905.950	29.707.850	82,74
Asistensi Penyusunan Dokumen PPPD Bidang Kewilayahan	13.060.150	9.800.000	75,04
Pelaksanaan Monev Penyusunan PPPD Bidang Kewilayahan	18.320.000	13.558.000	74,01
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi PPD Bidang Kewilayahan	39.664.550	31.039.940	78,26
<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>611.376.360</b>	<b>609.169.882</b>	<b>99,64</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>11.376.360</b>	<b>609.169.882</b>	<b>99,64</b>
<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	<b>463.354.450</b>	<b>461.874.712</b>	<b>99,68</b>
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	370.149.950	369.207.596	99,75
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	93.204.500	92.667.116	99,42
<b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>98,41</b>
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Informatika	3.450.000	3.395.000	98,41
<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>144.571.910</b>	<b>143.900.170</b>	<b>99,54</b>
Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan Bidang IT dan Inovasi	144.571.910	143.900.170	99,54
<b>JUMLAH</b>	<b>11.088.417.000</b>	<b>10.747.344.747</b>	<b>96,92</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan 2022

Berdasarkan Tabel 3.7 rata-rata Program dan Kegiatan di Bappeda mampu menyerap anggaran di atas 90%, serta menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan tahun 2022 sebesar 96,92% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Tinggi**”.

## BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 memiliki capaian sebesar 100 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**. Namun, Bappeda tidak mampu mencapai target Nilai SAKIP.
2. Capaian kinerja keuangan 96,92% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.747.344.747,00 dari pagu anggaran sebesar Rp11.088.417.000,00 sehingga masuk dalam kategori peringkat kinerja keuangan **sangat tinggi**.

Beberapa tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan sebagai pengampu urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

1. perubahan pola kerja dikarenakan terjadi perubahan peraturan perundangan yang berhubungan dengan sistem kerja dan personil.
2. belum optimalnya sinergi dan harmonisasi antara Bappeda dan perangkat daerah lain, baik dalam perencanaan maupun pengendalian dan pengawasan.
3. belum terpolanya disiplin kerja pada seluruh perangkat daerah khususnya dalam pengumpulan data, informasi, dan pelaporan baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dokumen laporan pelaksanaan perencanaan dan pengendaliannya.
4. penjadwalan kegiatan yang terlambat dikarenakan proses penganggaran yang mundur.
5. terdapat kegiatan-kegiatan yang mendadak muncul sebagai sebuah prioritas yang harus dikerjakan, namun luput dari perencanaan sebelumnya.
6. ketimpangan kompetensi SDM perencana
7. perubahan personil perencana akibat bergesernya jabatan dan penugasan sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mendukung tercapainya kualitas perencanaan.

8. belum optimalnya implementasi akuntabilitas di Bappeda khususnya terkait pengendalian capaian kinerja dan pendokumentasian hasil kerja dan kinerja.

Untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Badan Perencanaan Pembangunan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menyusun penjadwalan kerja terkoordinasi lintas bidang dan lintas lini;
2. membuat skala prioritas pekerjaan sesuai dengan perencanaan kas;
3. melaksanakan *inhouse training* bagi perencana seKabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kompetensi perencana khususnya dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas;
4. melaksanakan asistensi kepada PD dalam setiap tahapan proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terjadwal dan ketat terhadap perencanaan yang dilakukan secara periodik selama tahun berjalan;
6. Meningkatkan sinergi lintas sektor dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan; serta
7. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Februari 2023  
Kepala BAPPEDA,  
  
**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., MTP**  
NIP. 19680609 199503 1 003

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Dokumen-dokumen pendukung dilampirkan/disajikan pada link**

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1F75cawTrejTsAPkQyT2LuK55m65spYO7>

**Laporan Kinerja Program dan Kegiatan**

<https://drive.google.com/drive/folders/1XPculcx3LyIs5ad3RkOgA8hXIsSupl76>